

**UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM
MENUNJANG PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2015-2016**

IQLIMA VADYA ANAZHIL, EKO PUDJOLAKSONO
AKUNTANSI/ FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA UNIVERSITAS SURABAYA
iqlimavadyaanazhil@gmail.com

Abstrak - Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Pembangunan Pemerintah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Selama ini sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan upaya peningkatan PAD tetapi belum optimal dikarenakan keterbatasan pengetahuan pemerintah mengenai PAD serta pembayaran dan penarikan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Upaya peningkatan PAD harus dianalisis terlebih dahulu masalah PAD seperti apa yang dihadapi Pemerintah agar implementasi dalam Upaya Peningkatan PAD berjalan dengan baik. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan merupakan *applied research*, dimana akan memberikan solusi mengenai peningkatan PAD yang tepat sehingga dapat membantu Kabupaten Seruyan untuk Meningkatkan PAD. Dalam penelitian ini menggunakan data dari Laporan Realisasi Pendapatan Daerah. Upaya untuk meningkatkan PAD yang dapat dilakukan oleh Kabupaten Seruyan yaitu dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, setelah berhasil dilakukan maka peningkatan PAD dapat dicapai oleh pemerintah Kabupaten Seruyan

Kata kunci : PAD (pendapatan asli daerah), Intensifikasi, Ekstensifikasi

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia pada umumnya merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus atas kenaikan pendapatan perkapita yang berlangsung dalam jangka panjang Berbagai macam kebijakan telah diformulasikan agar program-program pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat salah satu cara yang dapat diharapkan untuk memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah adalah melalui pemberdayaan sektor-sektor unggulan sebagai penggerak perekonomian daerah dan keterkaitan ekonomi antar daerah. Penekanan pada pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variabel ekonomi yang merupakan indikator kunci dalam pembangunan. Secara umum permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Seruyan dalam menyelenggarakan otonomi daerah terhadap pengelolaan PAD yaitu, kemandirian daerah untuk membiayai daerahnya dalam menyelenggarakan pembangunan saat ini

dihadapkan pada kendala masih relative rendahnya keberhasilan daerah dalam meningkatkan PAD.

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai. Bagi kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang cukup besar, tentu saja Kabupaten Seruyan ingin berhasil dalam mewujudkan pembangunan yang menyejahterakan masyarakat agar dapat mengurus daerah dengan bijak dan mandiri. Dalam pelaksanaannya Kabupaten Seruyan sangat memerlukan anggaran biaya yang tidak sedikit dan harus sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sumber pembiayaan tersebut tentunya harus berpengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu untuk mengurangi pentransferan dana dari pusat diperlukannya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Seruyan. Hal ini dapat dilakukan dengan memformulasikan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dalam bentuk kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah yang merupakan pendapatan terbesar pada sumber keuangan asli daerah. Salah satu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dapat dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah melalui efisiensi pemungutannya (Abdul Halim, 2013).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, sumber data, aspek-aspek teknis yang terkait dan alasan dari setiap *mini research question*. Sumber data penelitian ini adalah *field research* karena peneliti memperoleh data yang dibutuhkan melalui observasi langsung, wawancara dan menganalisis dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2016 mengalami peningkatan atau kenaikan jumlah tetapi persentasenya menurun

terhadap realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Seruyan tahun 2015, yaitu pada tahun 2016 berdasarkan tabel 4.1 Komposisi Pendapatan Asli Daerah besarnya jumlah PAD pada tahun 2015 ke 2016 meningkat dari Rp. Rp 37.990.207.872,19 menjadi Rp 38.528.004.216,94,. Adapun namun persentasenya menurun sebesar 0,32 % yaitu pada tahun 2016 sebesar 108,81 % terhadap persentase tahun 2015 yaitu sebesar 109,19%. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan pada tahun 2016 lebih besar dengan nilai Rp 35.409.892.6222,76 dari pada 2015. Dengan nilai Rp 34.793.248.965,45. Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dianalisis pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2016 terhadap pendapatan asli daerah tahun 2015 sebagai berikut;

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4.6

Uraian	2015			2016			Pertumbuhan %
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Total Pendapatan Asli Daerah	34.793.248.965,45	37.990.207.872,19	109,19	35.409.892.6222,76	38.528.004.216,94	108,81	-0,38
1 Pajak daerah	6.609.101.209,00	7.963.629.508,00	120,49	5.338.538.712,00	7.470.165.209,50	139,93	19,44
2 Retribusi Daerah	7.140.660.628,00	6.813.481.572,48	95,42	7.675.707.351,00	8.807.609.079,00	114,75	19,33
3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di	5.579.549.236,00	5.579.549.236,73	100,00	6.081.708.668,04	5.435.727.770,65	89,38	-10,62
4 Lain-lain pendapatan yang sah	15.463.937.891,72	17.633.547.554,98	114,03	16.313.937.891,72	16.814.602.157,79	103,07	-10,96

Dalam pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah yang rendah yang pendapatan asli daerah merupakan tolak ukur bagi kemampuan daerah dalam menjalankan dan mewujudkan otonomi daerah. Artinya semakin besar suatu daerah memperoleh pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Namun yang terjadi di Kabupaten Seruyan Pendapatan Asli Daerah yang diterima relatif rendah, sehingga untuk menjalankan pembangunan daerah belum mendapat dukungan dan dorongan yang optimal dari sumber keuangan daerah.

Walaupun penerimaan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 mengalami pencapaian yang baik, hal ini tidak semata-merta dapat meningkatkan

kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerahnya meningkat terutama untuk membiayai pembangunan daerah Kabupaten Seruyan. Dengan penerimaan PAD di Kabupaten Seruyan bisa dilakukannya Pemanfaatan belanja dialokasikan untuk hal-hal produktif, seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya meningkatkan pelayanan publik dengan mengubah komposisi belanja dan meningkatkan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Yang selama ini pembiayaan belanja daerah lebih banyak untuk keperluan belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Perkembangan pembangunan infrastruktur daerah sangat perlu untuk diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena salah satu yang menjadi daya tarik bagi investor dalam berinvestasi dilihat dari kesiapan insfrastruktur baik jalan, jembatan, transportasi maupun telekomunikasi. Namun berdasarkan hasil observasi jalan dan jembatan penghubung antar kecamatan masih dalam tahap pembagunan yang waktunya lumyang sangat lama, Hal ini dikarenakan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan tersebut dan dana terbesar masih di bantu oleh pusat. Akibat lain dari rendahnya Pendapatan Asli Daerah yaitu perbaikan infrastruktur jembatan . Seperti hasil observasi, pembangunan jembatan tersebut baru terealisasi pada tahun 2016 hingga kini belum selesai. Pembangunan jembatan ini berasal dari APBN karena sumber Pendapatan Asli Daerah tidak mencukupi untuk pembangunan yang menghabiskan dana ratusan Miliar. Keberadaan jembatan ini sangat penting untuk membuka akses bagi investor bagi perkembangan di sektor ekonomi.

Dalam menanggapi permasalahan yang ada, pemerintah Kabupaten Seruyan tidak bisa hanya mengandalkan dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah saja dalam memajukan infrastukturnya. Karena untuk memajukan infrastruktur membutuhkan biaya yang mahal ditengah kapasitas fiskal yang belum memadai. Oleh karena itu, dapat memajukan dunia usaha terutama

terkait dengan infrastruktur yang dapat mendorong iklim perekonomian yang dapat menjadikan lahan bisnisnya. Selain itu diperlukannya ketegasan yang harus disampaikan kepada Pemerintah Pusat agar pembangunan infrastruktur menjadi prioritas dan catatan yang harus diperbaiki. Sehingga dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat maka infrastruktur akan meningkat dan berakibat juga terhadap perolehan perkapita masyarakat dan secara tidak langsung mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kabupaten seruyan menunjukkan bahwa dari segi keuangan kemandiriannya masih sangat rendah karena masih tergantung oleh dana transfer dan bantuan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi. Sementara pemerintah kabupaten seruyan sangat tergantung terhadap pajak daerah, Sebagaimana tujuan dari pemungutan pajak adalah sebagai keperluan pembangunan. Namun di Kabupaten Seruyan masih terdapat pajak daerah tidak digunakan sebagaimana estisnya contohnya seperti membiayaan fasilitas pegawai. Hal ini sangat tidak diharapkan karena pajak daerah harusnya untuk perbaikan pembangun di Kabupaten Seruyan. Penerimaan pajak daerah belum optimal dilihat dari masih banyaknya potensi pajak yang belum digali oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah belum efektif dalam melakukan pendataan dan penarikan npajak. Sehingga diperlukan kembali melakukan pendataan dari berbagai objek pajak. Belum memadainya fasilitas yang ada di Kabupaten Seruyan yang menyebabkan biaya pembangunan juga rendah. Hal ini menyebabkan wajib pajak melakukan tawar menawar atau bernegosiasi dengan petugas pemungut pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Pemerintahan Kabupaten Seruyan saat ini dianggap belum optimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah hal ini dikarenakan besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima saat ini sangat tergantung pada lain- lain pendapatan yang sah, sementara untuk pajak dan retribusi daerah masih sangat rendah.

Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2016 mengalami peningkatan atau kenaikan jumlah tetapi persentasenya menurun terhadap realisasi pendapantan asli daerah kabupaten Seruyan tahun 2015, yaitu pada tahun 2016. Pemerintah kabupaten seruyan belum optimal terkait dengan komitmen dan konsistensinya terhadap peningkatan PAD dikarenakan penggalian potensi sumber PAD belum secara signifikan meningkatkan jumlah PAD. Hal ini dapat dilihat melalui besarnya PAD dari pajak, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta belum adanya PAD yang bersumber dari pengelolaan sumber daya potensi yang berdaya saing dan memiliki potensi unggulan daerah. Adanya peningkatan peran pemerintah secara aktif dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi serta melakukan inovasi untuk memunculkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan PAD sebagai modal pembangunan daerah.

Simpulan di atas memberi Implikasi terhadap ketergantungan PAD besarnya sangat bergantung dengan dana lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintah Kabupaten Seruyan belum dapat secara maksimal meningkatkan PAD secara signifikan dikarenakan besarnya PAD yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah hanya bersifat sementara dan besarnya tidak dapat diukur. PAD tidak dapat memenuhi biaya pembangunan daerah sehingga berdampak pada perkembangan daerah menjadi lambat. Terlihat dari perkembangan daerah baik dari ekonomi dan pembangunan daerah yang masih sangat rendah. Sehingga untuk menjadi kabupaten yang maju sangat sulit diraih Kabupaten Seruyan. Pertumbuhan PAD berdampak secara sistemik terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Seruyan.

Pendapatan asli daerah dalam peningkatannya harus Adanya komitmen dan konsistensi Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan PAD sesuai dengan potensi Kabupaten Seruyan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi serta pengoptimalan peran pemerintah melalui perangkat daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi antar perangkat daerah dan

lembaga yang terkait karena meningkatkan besaran penerimaan pajak dan retribusi PAD sesuai dengan peraturan daerah yang ada di Kabupaten Seruyan juga harus menghadirkan atau memunculkan potensi sumber PAD melalui pengelolaan sumber daya yang berdaya saing dan memiliki potensi unggulan daerah. Dalam peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah harus dapat menggali sumber-sumber PAD agar bisa meningkat. Pemerintah harus konsisten terhadap semua sumber PAD ditambah menggali potensi sumber daya daerah yang dianggap mampu menghasilkan PAD. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Seruyan yang hasilnya digubakan sebagai modal pembangunan. Pemerintah perlu menganalisa proses penetapan kebijakann terkait besarnya pungutan pajak dan retribusi terhadap usaha kecil menengah dan menggalakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan usaha masyarakat yang bergerak pada bidang komodity dan produk unggulan daerah yang berdaya saing untuk menciptakan dunia usaha bagi masyarakat Kabupaten Seruyan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baihaqi, 2011. *Jurnal Akuntansi* Vol. 1 No. 3 (2011) 246-266: Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
- Fuadi, S. H. (2016). *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*. Deepublish. Gambaran Umum, <https://seruyankab.go.id>, diakses 7 Juli 2017
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah: edisi keempat* Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Malano, H. (2011). *Selamatkan pasar tradisional: potret ekonomi rakyat kecil*. Gramedia Pustaka Utama.
- Penduduk Kabupaten Seruyan, <https://seruyankab.bps.go.id/> , diakses 7 Juli 2017.
- Rachim, A. (2015). *Barometer Keuangan Negara. Edisi Pertama. CV. Andi Offset. Yogyakarta, 55281.*
- Republik Indonesia 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Republik Indonesia 2010 *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 , maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi*
- Republik Indonesia 2010. *PP No. 24 Tahun 2005 diperbarui menjadi SAP berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.*
- Sianturi, A. (2014). *Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu)*. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 557-563.
- Suwandi. 2015. *Desentralisasi fiskal* Yogyakarta: Deepublish
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Mengenai Pemerintah Daerah*
- Undang- undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 *tentang pemerintah daerah pasal 285. UU 2009 No 28 tahun 2009 Pajak Daerah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang pemerintah daerah pasal 157*
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Kharisma Putra Utama Offset: PT. Raja Grafindo Persada